

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	5
1.4. Maksud dan Tujuan.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	11
BAB IV PENUTUP.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa SKPD wajib menyusun Rencana kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Kecamatan Bendo Tahun 2019 mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2019, Renstra Kecamatan Bendo tahun 2018-2023, serta memperhatikan Renja Kecamatan Bendo Provinsi dan Bappenas. Disamping itu, penyusunan Renja ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sampai dengan tahun 2023 serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/ kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan usulan-usulan yang muncul pada pelaksanaan musrenbang.

Selanjutnya Renja Kecamatan Bendo tahun 2019 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019. Dan sesuai amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 54 tahun 2010 pada pasal 285 disebutkan RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, sehingga SKPD dapat melakukan pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dalam perubahan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2017

- tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2017 tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 824)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Tahun 2017)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomo 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Jawa Timur Nomo 03 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan tahun 2005-2025
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023
 16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2019; (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018 nomor 30);
 17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019

18. Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2019
19. Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2018-2023

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai suatu produk perencanaan, dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara fungsional Perubahan Rencana Kerja merupakan Rencana kerja induk yang telah diubah karena adanya perubahan asumsi –asumsi penganggaran dan target kinerja, penyesuaian kegiatan, maupun penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat atau provinsi.

Berikut akan dijelaskan secara hubungan dokumen perubahan Rencana Kerja dengan Dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang dididalamnya memuat mengenai visi.misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.
- Perubahan RKPD disusun dengan berpedoman pada RKPD induk dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja
- Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan dan mengacu renstra SKPD terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja
- Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan perubahan renja SKPD yang disusun terkait program dan kegiatan capaian kinerja dan pagu anggaran
- Selanjutnya perubahan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sector pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efektivitas alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja perubahan Tahun 2019 adalah untuk :

1. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bendo Tahun 2018-2023 ;
2. Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Bendo dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Restra;

1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Perangkat daerah Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	Dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan Renja Perangkat Daerah yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka pendanaan Daerah
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	Uraian ringkas dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah baik berskala nasional maupun lokal
1.3	Hubungan Antar Dokumen	Hubungan perubahan renja Perangkat Daerah dengan dokumen lain yang relevan (Perubahan RKPD, KUPA dan PPAS Perubahan serta Rancangan Perubahan APBD) beserta

		penjelasannya
1.4	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen perubahan Renja Perangkat daerah
1.5	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian / penyusunan Perubahan Renja PD
BAB II HASIL EVALUSI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN		
	Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD sampai dengan tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD kecamatan Bendo tahun sebelumnya samapai dengan tahun berjalan sampai dengan triwulan II(kompilasi hasil capaian target kinerja Renja PD dengn target renstra Perangkat Daerah)	
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		
	Memuat pergeseran /perubahan pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Juga dicantumkan tanggal, nama kepala Perangkat Daerah dan stempel	
BAB V PENUTUP		
	Berisikan hal hal penting lainnya dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. Juga dicantumkan tanggal, nama perangkat daerah dan stempel	

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BENDO TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2019 sampai dengan triwulan II

Evaluasi Renja tahun 2019 sampai dengan triwulan II dilakukan melalui analisa capaian program dan kegiatan. Capaian indikator kinerja dan keuangan dihitung dengan membandingkan capaian triwulan II program dan kegiatan tahun 2019 dengan capaian yang harus dicapai SKPD pada tahun 2019, dikompilasi dengan target akhir capaian renstra SKPD

Adapun hasil evaluasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Bendo tahun 2019 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 triwulan II

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2019 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja Pada Triwulan						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019(%)			
		Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	Vol	Satuan	Rp.	I			II				Volume	%	Vol	satuan	Rp.	Vol	Rp.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat / aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran	80	Nilai	82.500.000		Nilai		77	Nilai	15.000.000	0	Nilai	-		Nilai	-	0	-	0	Nilai	0			
Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Nilai IKM		Nilai	82.500.000		Nilai		76	Nilai	15.000.000	0	Nilai	-		Nilai	-	0	-	0	Nilai	0			
Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Prosentase Pelayanan kewilayahan kecamatan	100.00	%	489.250.000		%		60	%	119.250.000	5	%	6.100.000	11	%	16.450.000		12.6%	5.1	%	15.050.000			
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Persentase pelayanan kewilayahan kecamatan		%	489.250.000		%		100	%	119.250.000	5	%	6.100.000		%	16.450.000		12.6%	5.1	%	15.050.000			
Program Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	100.00	%	2.785.000.000		%		100	%	550.000.000	3	%	15.600.000	20	%	62.386.800		2.8%	2.8	%	15.600.000			
Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat		Kegiatan	484.000.000		Kegiatan		4	Kegiatan	175.000.000	0	Kegiatan	15.600.000		Kegiatan	61.636.800		-	0	Kegiatan	15.600.000			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun		pekerjaan	2.301.000.000		pekerjaan		4.00	pekerjaan	375.000.000	0	pekerjaan	-	-	pekerjaan	750.000		-	0	pekerjaan	-			

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	1.429.000.000	%	100	%	304.000.000	21	%	63.763.857	20	%	61.955.592	%	24.5%	24.	%	73.491.796
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran		%	975.000.000	%	100	%	215.000.000	20	%	43.684.407	21	%	45.880.592	%	22,5%	22.4	%	48.212.346
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur		%	454.000.000	%	100	%	89.000.000	23	%	20.079.450	18	%	16.075.000	%	28,4%	30.4	%	25.279.450
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100.00	%	807.500.000	%	100	%	165.000.000	27	%	44.766.150	18	%	28.943.350	%	30.4%		%	50.130.550
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional		Paket	245.000.000	Paket	12	Paket	47.500.000	3	Paket	9.966.150	1	Paket	11.843.350	Paket	32,3%	4	Paket	15.330.550
Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli		Jenis	302.500.000	Jenis	6.	Jenis	92.500.000	1	Jenis	34.800.000	0	Jenis	17.100.000	Jenis	37,6%	1	Jenis	34.800.000
Rehabilitasi/Pe meliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara		Gedung	260.000.000	Gedung	2.	Gedung	25.000.000	0	Gedung	-	0	Gedung	-	Gedung	-	0	Gedung	0
Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00	%	61.750.000	%	100	%	6.750.000	17	%	1.151.150	12	%	1.441.450	%	28.9%	28.9	%	1.951.150
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan		Dokumen	61.750.000	Dokumen	10.	Dokumen	6.750.000	2	Dokumen	1.151.150	3	Dokumen	1.441.450	Dokumen	28.9%	5	Dokumen	1.951.150
				5.655.000.000	0		0	1.160.000.000	0	0	131.381.157			171.177.192	0			156.223.496	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaab OPD Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tahun 2019 tersaji dalam Tabel berikut :

Tabel III.2

**RENCANA PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS DAN PAGU INDIKATIF
PERUBHAN RKPD KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019**

SKPD : KECAMATAN BENDO

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2019								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ketera ngan RKPD Perub ahan
			Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01. 2101	KECAMATAN BENDO						410.000.000	510.000.000	100.000.000				
4	Fungsi penunjang Urusan						410.000.000	510.000.000	100.000.000				
4.01	Administrasi Pemerintahan						410.000.000	510.000.000	100.000.000				
4.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	80 Skor	80 skor			209.000.000	209.000.000	0				
4.01.0 1.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Kec. Bendo	Kec. Bendo	105.000.000	105.000.000	0	DID	0 Persen		
4.01.0 1.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100 Persen	100 Persen	Kec. Bendo	Kec. Bendo	89.000.000	89.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 Persen		
4.01.0 1.023	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Survey IKM	1 Dokumen	1 Dokumen	Kec. Bendo	Kec. Bendo	15.000.000	15.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 Dokumen		
4.01. 02	Progrm Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100 Persen	100 Persen			75.000.000	175.000.000	100.000.000				
4.01.0 2.024	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	12 paket	12 paket	Kec. Bendo	Kec. Bendo	47.500.000	47.500.000	0	DID	0 Paket		
4.01.0 2.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	6 Unit	6 Unit	Kec. Bendo	Kec. Bendo	27.500.000	27.500.000	0	DID	0 Unit		
4.01.0 2.051	Rehabilitasi /Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Kantor		1 Kegiatan		Kec. Bendo	0	100.000.000	100.000.000	DAU			

Perubahan rencana kerja (Renja) Kecamatan Bendo Tahun 2019

4.01.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen			6.750.000	6.750.000	0				
4.01.07.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja dan keuangan	10 Dokumen	10 Dokumen	Kec. Bendo	Kec. Bendo	6.750.000	6.750.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 Dokumen		
4.01.80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase pelayanan kewilayahan kecamatan	100 Persen	100 Persen			119.500.000	119.500.000	0				
4.01.80.001	Fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan Kecamatan	Persentase pelayanan kewilayahan kecamatan	100 persen	100 persen	Kec. Bendo	Kec. Bendo	119.500.000	119.500.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 Persen		
4.01.2.102	KELURAHAN BENDO						750.000.000	1.075.000.000	525.000.000				
4	Fungsi Penunjang Urusan						750.000.000	1.075.000.000	525.000.000				
4.01	Administrasi Perkantoran						750.000.000	1.075.000.000	525.000.000				
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						110.000.000	110.000.000	0				
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Kel. Bendo	Kel. Bendo	110.000.000	110.000.000	0	0 Persen			
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana						90.000.000	90.000.000	0				
4.01.02.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor	6 jenis	6 Jenis	Kel. Bendo	Kel. Bendo	65.000.000	65.000.000	0	DID	0 Jensi		
4.01.02.051	Rehabilitasi/ pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab dan dipelihara	2 gedung	2 Gedung	Kel. Bendo	Kel. Bendo	25.000.000	25.000.000	0	DID	0 Gedung		
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan						550.000.000	1.075.000	525.000.000				
4.01.33.004	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	6 jenis	6 jenis	Kel. Bendo	Kel. Bendo	375.000.000	547.059.000	172.059.000	DID	0 jenis		
4.01.33.059	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	2 gedung	4 kegiatan	Kel. Bendo	Kel. Bendo	175.000.000	175.000.000	0	DID	0 gedung		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana local kelurahan	1pekerjaan	4 kegiatan	Kel. Bendo	Kel. Bendo	0	303.491.000	303.491.000	DAU Tambahan	0 Pekerjaan		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	4 kegiatan	4 kegiatan	Kel. Bendo	Kel. Bendo	0	49.450.000	49.450.000	DAU Tambahan	0 Kegiatan		

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bendo tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai akhir tahun berjalan serta rencana perubahan program dan kegiatan pada tahun 2019. Renja Perubahan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Bendo Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bendo tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2019. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait.

Semoga dokumen ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program pembangunan di Kecamatan Bendo.

Magetan, Juli 2019
CAMAT BENDO

TRI ATMADI,S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 19670227 198602 1 001